

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI TK PERJUANGAN DESA KLUWIH KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG

Budiarti¹ Titik Haryati² Yovitha Yuliejantiningih³

¹TK Perjuangan Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

^{2,3}Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang

Email: Budiarti1112@gmail.com¹, titikh30@gmail.com², 085901221@upgris.ac.id³

Abstrak

Hasil penelitian 1) peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam implementasi prinsip MBS di TK kanak Perjuangan adalah memberikan pertimbangan berbagai program sekolah. Bentuk pertimbangan itu seperti membarikan masukan dalam perspektif anggaran, sarpras, pengelolaan pembelajaran, kemitraan dengan instansi dan orang tua peserta didik. 2) Peran komite sekolah sebagai pendukung dalam implementasi prinsip. Bentuk dukungan materi berupa penggalangan dana dari masyarakat, dukungan dalam bentuk tenaga diwujudkan dalam kerja bakti bersama, dan dukungan dalam bentuk pemikiran. 3) peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam implementasi prinsip manajemen berbasis sekolah di TK Perjuangan dilakukan dalam bentuk pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam laporan akhir tahun. 4) Peran komite sekolah sebagai mediator dalam implementasi prinsip MBS di TK Perjuangan dilakukan dengan menjadi jembatan penghubungan antara sekolah dengan masyarakat dan instansi lain. Peran sebagai mediator ini dalam rangka membantu sekolah mengsucceskan pelaksanaan MBS dengan semua prinsipnya.

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan satuan Pendidikan Anak Usia dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dilaksanakan berdasarkan Standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah /madrasah (Undang-Undang RI No 20 Tahun 2013 Tentang Sisdiknas pasal 51 ayat 1) sedangkan otonomi daerah yang diatur dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 berpengaruh pula dalam pengelolaan Pendidikan yang semula sentralistik menjadi desentralistik otonomi Pendidikan dalam bentuk Manajemen Berbasis Sekolah. Pelaksanaan manajemen sekolah yang efektif dan efisien menuntut pelaksanaan manajemen secara terpadu dan terintegrasi dalam pengelolaan bidang-bidang kegiatan manajemen pendidikan, melalui manajemen sekolah yang efektif dan efisien tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Mulyasa, 2015: 21).

Kini satuan pendidikan sekolah harus dapat bertanggung jawab untuk dapat mengurus dirinya sendiri, melalui mekanisme yang dikenal dengan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MBS) jika awalnya satuan pendidikan tersebut harus lebih banyak memperoleh

petunjuk dari atasan atau dari struktur organisasi pada level di atasnya, atau lebih banyak menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari institusi vertikal di atasnya maka dalam era ini satuan pendidikan sekolah harus secara kreatif dan inovatif untuk dapat melaksanakan proses pengelolaan organisasi sendiri. Dengan memberikan baik dalam bidang material, manajemen pembinaan serta bentuk partisipasi lainnya, system pemerintahan ini di kenal dengan desentralisasi atau otonomi daerah di tingkat satuan pendidikan sekolah disebut Manajemen Berbasis Sekolah (Suparlan, 2013: 3-4).

Salah satu Karakteristik dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak terlepas dari adanya peran serta masyarakat. Mulyasa (2017:50-51) mengatakan bahwa Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan: 1) memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, 2) memperkuat tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat dan 3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam menarik simpati masyarakat terhadap sekolah dan menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah masyarakat. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan memberitahu masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 pasal 27 ayat (1) yaitu Standar Pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Pendidikan yang di laksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan yang efisien dan efektif. Pengelolaan sekolah menurut peraturan pemerintah tersebut melibatkan peran serta masyarakat dan bertumpu pada kemampuan keputusan oleh pihak sekolah harus mengikut sertakan orang tua dan masyarakat melalui komite sekolah.

Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (*community based participation*) dan manajemen berbasis sekolah (*school based management*) yang kini tidak hanya menjadi wacana tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia (Mulyasa, 2015: 15). Kegiatan perencanaan pendidikan dan kegiatan pendidikan tidak pernah terlepas dari masyarakat sekitarnya, sebab ada hubungan saling memberi, saling mendukung dan saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dan masyarakat (Pidarta, 2016: 18).

Partisipasi atau peran masyarakat dan *stakeholders*. Pendidikan yang sangat kompleks kemudian disederhanakan, agar memudahkan sekolah berinteraksi dengan institusi pendidikan itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan bukan lagi dipandang sebagai suatu kewajiban, tetapi menjadi haknya. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah pasal (1) No 2 menyatakan komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pengelolaan komite sekolah merupakan suatu cara untuk mengatur sebuah organisasi, mulai dari perencanaan program kerja, pengorganisasian pelaksanaan program kerja, dan evaluasi program, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan dan fungsi komite sekolah agar tujuan dibentuknya komite sekolah dapat tercapai efektif dan efisien.

Partisipasi komite sekolah di TK Perjuangan Desa Kluwih, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dari observasi prapenelitian seperti pemberian bantuan sarana prasarana. Selama ini partisipasi komite sekolah dikelola oleh ketua komite sekolah dengan dana pribadi terlebih dahulu. Menurut kepala sekolah TK Perjuangan Desa Kluwih, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dan beberapa orang guru partisipasi masyarakat dalam bentuk sarana prasarana yang dikelola komite sekolah sangat berarti bagi TK Perjuangan Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. (CTL / 01/ 14 Agustus 2021).

Hasil wawancara prapenelitian dengan komite sekolah, partisipasi komite sekolah bukan tanpa alasan kecuali memang kewajiban sebagai anggota masyarakat untuk berpartisipasi terhadap pendidikan di wilayahnya, juga sebagai usaha untuk mengurangi imej, masyarakat terhadap generasi muda desa Kluwih (terutama perempuan) yang mempunyai mata pencaharian yang dianggap oleh masyarakat sebagai pekerja melanggar norma agama. harapanya jika fisik dan lingkungan sekolah rapi dan menarik, animo masyarakat menyekolahkan anak-anaknya tinggi, karena kecuali di rumah di sekolahaan pendidikan moral dan akhlak mulia ditanamkan sejak dini untuk bekal hidup anak-anak dimasa depan.

Komite sekolah TK Perjuangan Desa Kluwih, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang terdiri dari sepuluh personil dari unsur masyarakat dan dewan guru. Bentuk partisipasi komite sekolah dan *stakeholders* TK Perjuangan Desa Kluwih, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Bentuk Partisipasi Komite Sekolah

No	Tahun	Bentuk	Komite	Jumlah Dana
1	2015	Ruang kelas Baru	V	40.000.000,-
2	2017	Ruang Tamu	V	10.000.000,-
3	2020	Mushola	V	25.000.000,-

Partisipasi komite sekolah tidak hanya seperti yang tercantum pada tabel di atas tetapi juga dilibatkan dalam penyusunan program sekolah, rencana anggaran kegiatan sekolah (RKAS) dan menyusun kurikulum. Berdasarkan latar belakang menarik untuk diteliti bagaimana peran komite sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) di TK Perjuangan Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian ini berfokus dalam mendeskripsikan manajemen kurikulum sekolah. Penelitian ini bertempat di Taman Kanak-Kanak Perjuangan Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis dari Miles dan Huberman menjelaskan langkah-langkah analisis data penelitian kualitatif yaitu 1) *data collection* (pengumpulan data); 2) *data condensation* (kondensasi data); 3) *data display* (penyajian data); 4) *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan). Keabsahan data menggunakan tahapan uji kredibilitas; triangulasi sumber; triangulasi tehnik, uji *transferability*; uji *dependability*.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam implementasi prinsip manajemen berbasis sekolah di Taman Kanak-kanak Perjuangan desa Kluwih.

Temuan penelitian ini bahwa (1) peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan menuju kemandirian TK Perjuangan diantaranya adalah (a) memberi pertimbangan pengelolaan sumber daya secara mandiri; (b) memberi pertimbangan kemandirian sekolah dalam mengambil keputusan; dan (c) memberi pertimbangan kemandirian dalam berinovasi. (2) Peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dalam membangun mitra sekolah di TK Perjuangan diantaranya adalah (a) memberi

pertimbangan dalam menjalin kerjasama dengan instansi lain; (b) memberi pertimbangan dalam menjali kerjasama dengan masyarakat (3) peran komite sekolah memberikan pertimbangan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat TK Perjuangan diantaranya adalah dengan memberi pertimbangan partisipasi masyarakat dalam pendanaan, ide pemikiran dan tenaga (4) peran komite sekolah memberikan pertimbangan dalam mewujudkan keterbukaan TK Perjuangan diantaranya adalah dengan memberi pertimbangan Keterbukaan dalam program dan keuangan sekolah; (5)) peran komite sekolah memberikan pertimbangan dalam mewujudkan akuntabilitas TK Perjuangan diantaranya adalah dengan memberi pertimbangan sekolah dalam bertanggung jawab atas program dan pengelolaan keuangan.

Lebih jelasnya temuan penelitian tentang Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam implementasi prinsip manajemen berbasis sekolah di Taman Kanak-kanak Perjuangan desa Kluwih disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Peran Komite Sekolah Sebagai Pemberi Pertimbangan dalam
Implementasi Prinsip MBS di TK Perjuangan Desa Kluwih

No	Prinsip MBS	Temuan Penelitian
1	Kemandirian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi pertimbangan Pengelolaan sumber daya secara mandiri 2. Memberi pertimbangan Kemandirian sekolah dalam mengambil keputusan 3. Memberi pertimbangan kemandirian dalam berinovasi
2	Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi pertimbangan dalam menjalin kerjasama dengan instansi lain. 2. Memberi pertimbangan dalam menjali kerjasama dengan masyarakat
3	Partisipasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi pertimbangan partisipasi masyarakat dalam pendanaan, ide pemikiran dan tenaga.
4	Keterbukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi pertimbangan Keterbukaan dalam program dan keuangan sekolah
5	Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi pertimbangan sekolah dalam bertanggung jawab atas program dan pengelolaan keuangan

Temuan penelitian ini diatas keunggulan dari sub fokus peran komite sekolah sebagai pelaksana fungsi pemberi pertimbangan dalam berbagai persoalan khususnya masalah implementasi prinsip MBS di TK Perjuangan Desa Kluwih adalah peran komite sekolah sebagai pertimbangan pada prinsip partisipasi. Jadi peran komite sekolah lebih di dominasi atau lebih kuat ketika sekolah akan menggali potensi partisipasi masyarakat, kemudian paling lemah adalah peran komite dalam pemberi pertimbangan pada prinsip akuntabilitas, hal ini dikarenakan selama ini sekolah kurang dalam memaksimalkan budaya akuntabilitas selain itu komite hanya terfokus pada partisipasi masyarakat sehingga mengenyampingkan prinsip lain salah satunya akuntabilitas.

Hasil penelitian ini di dukung dengan Herlinda (2017) yang berjudul “Peran komite sekolah terhadap kinerja guru di TK Aisyah II Kota Pekanbaru” bahwa komite sekolah TK Aisyah II Kota Pekanbaru dalam melaksanakan perannya sebagai badan pertimbangan, guru, memantau kondisi pendidikan di sekolah, ikut serta menyumbangkan dalam perbaikan sekolah, memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah, serta mengkoordinasikan dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah ikut menyumbang dalam bentuk tenaga untuk perbaikan sekolah. Sebagai badan pengontrol yaitu komite mengontrol proses perencanaan pendidikan dan pengawasan terhadap kualitas program sekolah dan dengan dewan pedidikan dalam dalam hal perencanaan pendidikan komite juga mengkomonikasikan atau menyampaikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah, serta membuat usulan krbijakan dan program Pendidikan kepala sekolah.

Demikian dengan Mursidi (2013) dengan judul "Pengelolaan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan yang dijalankan komite sekolah SDIA 29 dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDIA 29 Semarang sudah cukup baik. Pengelolaan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, dilaksanakan dengan mengoptimalkan empat peran komite sekolah, yakni: *advisory agency*, *supporting agency*, *controlling agency*, dan *mediator agency*. Faktor pendukung komite sekolah adalah besarnya dukungan wali murid, pengurus Jam'iyah di SD Islam Al Azhar 29 Semarang didominasi oleh kaum ibu.Sedangkan faktor penghambatnya adalah kesibukan pribadi dan masing-masing pengurus Jam'iyah, masih adanya pengurus Jam'iyah yang tidak melaksanakan tugasnya.

Hasil penelitian ini dalam perspektif teori sesuai dengan pendapat Hasbullah (2016: 92 – 95) bahwa peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan atau nasehat, adalah kemampuan komite sekolah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan di satuan

pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan informasi dan rekomendasi kepada satuan pendidikan supaya masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Adapun indikator kinerja dari peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan adalah kebijakan pendidikan, program pendidikan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan, kriteria tenaga kependidikan, dan Kriteria fasilitas kependidikan.

Demikian halnya pendapat Nasution (2016: 34) bahwa salah satu peran komite sekolah adalah memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai : Kebijakan dan program pendidikan; Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS) Kriteria kinerja satuan pendidikan; Kriteria fasilitas pendidikan; Kriteria tenaga pendidikan; dan Hal-hal yang terkait dengan pendidikan,

Nurkolis (2016: 65) menjelaskan bahwa komite sekolah memiliki peran untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang lebih luas, menyatukan visi, memperjelas misi baik untuk pemerintah maupun untuk sekolah itu sendiri. Komite sekolah menentukan kebijakan sekolah, visi, dan misi mengacu kepada ketentuan nasional dan daerah.

Pelaksanaan peran komite sekolah sebagai pertimbangan dalam implementasi prinsip MBS di TK perjuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat 1 menjelaskan bahwa Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, akan tetapi tetap menjadi mitra yang harus bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS). Karena tanpa manajemen yang baik tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif dan efisien. Dalam kerangka inilah tumbuh kesadaran akan pentingnya manajemen berbasis sekolah (MBS) yang memberikan kewenangan penuh (otonomi) kepada sekolah dan guru dalam mengatur pendidikan. Konsep MBS juga merubah sistem pembelanjaan anggaran semaksimal mungkin menjadi pemakaian anggaran seefisien mungkin. Sehingga komite sekolah diharapkan mampu bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk

mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan dan akuntabel.

Peran komite sekolah sebagai pendukung (*supporting agency*) dalam implementasi prinsip manajemen berbasis sekolah di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih.

Hasil temuan penelitian diketahui bahwa 1) peran komite sekolah sebagai pendukung dalam implementasi prinsip kemandirian sekolah di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih adalah dengan memberikan dukungan atas kemandirian pengelolaan sekolah; 2) peran komite sekolah sebagai pendukung dalam implementasi prinsip kemitraan di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih adalah dengan memberikan dukungan kerjasama sekolah dan pihak luar dalam berbagai kegiatan. 3) peran komite sekolah sebagai pendukung dalam implementasi prinsip partisipasi sekolah di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih adalah dengan memberikan dukungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat; 4) peran komite sekolah sebagai pendukung dalam implementasi prinsip keterbukaan sekolah di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih adalah dengan memberikan dukungan atas transparansi anggaran; 5) peran komite sekolah sebagai pendukung dalam implementasi prinsip akuntabilitas di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih adalah dengan memberikan dukungan atas pertanggung jawab pengelolaan sekolah

Lebih jelasnya temuan penelitian tentang peran komite sekolah sebagai sebagai pendukung (*supporting agency*) dalam implementasi prinsip manajemen berbasis sekolah di Taman Kanak-kanak Perjuangan desa Kluwih disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Peran Komite Sekolah Sebagai Pendukung dalam Implementasi Prinsip MBS di TK Perjuangan Desa Kluwih

No	Prinsip MBS	Temuan Penelitian
1	Kemandirian	Memberikan dukungan atas kemandirian pengelolaan sekolah
2	Kemitraan	Memberikan dukungan kerjasama sekolah dan pihak luar
3	Partisipasi	Memberikan dukungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
4	Keterbukaan	Memberikan dukungan atas transparansi anggaran
5	Akuntabilitas	Memberikan dukungan atas pertanggung jawab pengelolaan sekolah

Temuan penelitian ini diatas keunggulan dari sub fokus peran komite sekolah sebagai pelaksana fungsi pemberi dukungan dalam berbagai hal diantaranya adalah implementasi prinsip MBS di TK Perjuangan Desa Kluwih adalah peran komite sekolah pendukung pada prinsip keterbukaan. Jadi peran komite sekolah lebih di dominasi atau lebih kuat memberikan saran masukan ide dan gagasan serta dukungan kepada sekolah agar terbuka dalam berbagai aspek terutama masalah pendanaan, kemudian paling lemah adalah peran komite dalam pemberi dukungan pada prinsip kemandirian, komite sekolah kurang memahami akan pentingnya kemandirian sekolah sehingga kurang dapat memberikan dukungan.

Hasil penelitian ini selaras dengan Irawan (2021) yang berjudul “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Studi pada SMP Negeri 1 Surakarta.” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komite sekolah dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta, metode penelitian adalah diskripsi kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data komulatif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa tugas komite sekolah sebagai menindak lanjuti aspirasi masyarakat tidak mempengaruhi turunnya mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Hal ini karena perangkat Pendidikan SMP Negeri 1 Surakarta sebagai sebuah sistem sosial bersifat otopontetik yang dapat memperbaharui ketidakberfungsian pada salah satu atau sarana, prasarana maupun kerjasama dengan stakeholder.

Hasil penelitian ini dalam perspektif teori sesuai dengan pendapat Hasbullah (2016: 92 – 95) bahwa komite sekolah sebagai pendukung adalah bentuk dukungan komite sekolah baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Adapun indikator kinerja dari peran komite sekolah sebagai pendukung adalah mendorong orang tua untuk berpartisipasi dalam pendidikan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan, mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mendorong tumbuhnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Demikian halnya pendapat Nasution (2016: 34) bahwa salah satu peran komite sekolah

adalah melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan /organisasi/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

Mulyasa (2016: 50) menyatakan hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Pada konteks manajemen berbasis sekolah maka peran komite sekolah penting sebagai bentuk dukungan berbagai program dan bentuk kebersamaan sekolah dengan masyarakat.

Sementara itu Pantjastuti (2018: 75) berpendapat bahwa selama ini komite sekolah yang ada masih meneruskan peran dan fungsi BP3 di masa lalu yang hanya berfungsi sebagai stempel saja bagi sekolah. Peranserta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat berhak berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Lebih lanjut partisipasi masyarakat dalam pendidikan bisa meliputi peran perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Keikutsertaan masyarakat ini dapat diwujudkan dalam bentuk Komite Sekolah atau Dewan Pendidikan.

Pelaksanaan peran komite sekolah sebagai pendukung dalam implementasi prinsip MBS di TK perjuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat 1 menjelaskan bahwa Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Secara umum, manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesannya kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan

pengusaha dsb). Untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku.

Dengan otonomi yang lebih besar, maka sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang tentu saja lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Dengan fleksibilitasnya/ keluwesannya, sekolah lebih atraktif dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya sekolah secara optimal. Demikian juga dengan partisipasi/ keterlibatan warga sekolah dan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan sekolah, maka rasa memiliki mereka terhadap sekolah dapat ditingkatkan

Peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam implementasi prinsip manajemen berbasis sekolah di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih.

Temuan penelitian ini adalah 1) peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam implementasi prinsip kemandirian di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih adalah dengan melakukan pengawasan atas kemandirian pengelolaan sekolah, pengawasan tersebut dilakukan secara berkelanjutan. 2) Peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam implementasi prinsip kemitraan di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih adalah dengan pengawasan kerjasama sekolah dan pihak luar diantaranya dengan puskesmas, dengan wali murid dan instansi pemerintah. 3) Peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam implementasi prinsip partisipasi di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih dilakukan dengan pengawasan berbagai bentuk partisipasi masyarakat; 4) peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam implementasi prinsip keterbukaan di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih diantaranya dengan melakukan pengawasan transparansi anggaran RAPBS, 5) peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam implementasi prinsip akuntabilitas di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih adalah dengan melakukan pengawasan pertanggung jawab pengelolaan program sekolah.

Lebih jelasnya temuan penelitian tentang Peran komite sekolah sebagai sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam implementasi prinsip manajemen berbasis sekolah di Taman Kanak-kanak Perjuangan desa Kluwih disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Peran Komite Sekolah Sebagai Pengontrol dalam Implementasi Prinsip MBS di TK Perjuangan Desa Kluwih

No	Prinsip MBS	Temuan Penelitian
1	Kemandirian	Pengawasan atas kemandirian pengelolaan sekolah
2	Kemitraan	Pengawasan kerjasama sekolah dan pihak luar
3	Partisipasi	Pengawasan berbagai bentuk partisipasi masyarakat
4	Keterbukaan	Pengawasan transparansi anggaran RAPBS
5	Akuntabilitas	Pengawasan pertanggung jawab pengelolaan program sekolah

Temuan penelitian ini keunggulan dari sub fokus peran komite sekolah sebagai pelaksana fungsi pengawasan (control) dalam berbagai hal salah satunya adalah implementasi prinsip MBS di TK Perjuangan Desa Kluwih adalah peran komite sekolah pengawasan pada prinsip partisipasi. Jadi peran komite sekolah lebih di dominasi atau lebih kuat memberikan pengawasan kepada masalah partisipasi masyarakat, kemudian paling lemah adalah peran komite dalam pengawasan pada prinsip kemitraan, komite melakukan pengawasan secara massif dan berkelanjutan ketika berurusan dengan partisipasi masyarakat akan tetapi sebaliknya fungsi pengawasan kurang dilakukan dalam kegiatan kemitraan sekolah.

Hasil penelitian selaras dengan Rufaidah (2011) berjudul “Implementasi Peranan Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Standar Nasional Kecamatan Lumajang”. Hasil penelitiannya bahwa peranan Komite Sekolah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Standar Nasional Kecamatan Lumajang menempati posisi strategis sebagai mitra dan salah satu pilar Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Peranan ini dirasakan baik yang bersifat eksternal maupun internal dengan sistem Pendekatan Analisa SWOT, Komite Sekolah lebih dapat menilai faktor kekuatan yang dimilikinya sebagai penunjang kinerja dan mengatasi faktor kelemahan serta tantangan dengan kreatifitas dan inovasi sehingga kehadirannya sangat diharapkan.

Hasil penelitian ini dalam perspektif teori sesuai dengan pendapat Hasbullah (2016: 92 – 95) pengawasan yang dilakukan komite sekolah dalam rangka transparansi dan

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, Minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Adapun indikator kinerja dari peran komite sekolah sebagai pengontrol adalah melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan, melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan dalam program penyelenggaraan pendidikan, melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program keluaran pendidikan. Peran sebagai pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Demikian halnya pendapat Nasution (2016: 34) bahwa salah satu peran komite sekolah adalah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Pelaksanaan peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam implementasi prinsip MBS di TK perjuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat 1 menjelaskan bahwa Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam setiap kegiatan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Disamping itu, komite sekolah juga harus melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat mengenai peran keterlibatan komite sekolah melalui sosialisai itulah diharapkan masyarakat mengerti, mengetahui dan memahami sekaligus dapat memantau kinerja komite sekolah. Agar peran komite sekolah dapat berjalan optimal dan “tidak berat sebelah”, maka langkah /upaya sosialisasi dan komunikasi dengan orang tua siswa harus selalu dibina dan di kembangkan.

Peran komite sekolah sebagai mediator dalam implementasi prinsip manajemen berbasis sekolah di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih.

Temuan penelitian bahwa 1) peran komite sekolah sebagai mediator dalam implementasi prinsip kemandirian di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih adalah dengan mendorong sekolah melalui partisipasi masyarakat dalam menuju kemandirian sekolah; 2) peran komite sekolah sebagai mediator dalam implementasi prinsip kemitraan di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih adalah dengan menjembatani komunikasi dan

koordinasi kemitraan dengan masyarakat; 3) peran komite sekolah sebagai mediator dalam implementasi prinsip partisipasi di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih adalah dengan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam program sekolah; 4) peran komite sekolah sebagai mediator dalam implementasi prinsip keterbukaan di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih adalah dengan ikut memberikan sosialisasi terhadap program sekolah sebagai bentuk keterbukaan; 5) peran komite sekolah sebagai mediator dalam implementasi prinsip akuntabilitas di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih adalah dengan ikut menjadi mediasi dalam hubungan laporan pertanggung jawaban antara sekolah dan stakeholder.

Lebih jelasnya temuan penelitian tentang Peran komite sekolah sebagai mediator dalam implementasi prinsip manajemen berbasis sekolah di Taman Kanak-kanak Perjuangan desa Kluwih disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Peran Komite Sekolah Sebagai Mediator dalam Implementasi Prinsip MBS di TK Perjuangan Desa Kluwih

No	Prinsip MBS	Hasil Penelitian
1	Kemandirian	Mendorong sekolah melalui partisipasi masyarakat dalam menuju kemandirian sekolah
2	Kemitraan	Menjembatani komunikasi dan koordinasi kemitraan dengan masyarakat
3	Partisipasi	Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam program sekolah
4	Keterbukaan	Ikut memberikan sosialisasi terhadap program sekolah sebagai bentuk keterbukaan
5	Akuntabilitas	Ikut menjadi mediasi dalam hubungan laporan pertanggung jawaban antara sekolah dan stakeholder

Temuan penelitian ini keunggulan dari sub fokus peran komite sekolah TK Perjuangan Desa Kluwih sebagai pelaksana fungsi mediator dalam berbagai permasalahan tentang implementasi prinsip MBS adalah peran komite sekolah mediator pada prinsip partisipasi. Jadi peran komite sekolah lebih di dominasi atau lebih kuat sebagai mediator kepada masalah partisipasi masyarakat, kemudian paling lemah adalah peran komite dalam mediasi pada prinsip kemitraan, komite melakukan semangat menjadi mediasi atau jembatan penghubung adalah ketika pelaksanaan partisipasi atau kerjasama masyarakat. Hasil Penelitian ini selaras

dengan Gunawan (2012) berjudul “Pelaksanaan Tugas Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa selama pembentukan MBS, komite sekolah telah menjalankan peran dan fungsinya meskipun belum begitu optimal. Situasi ini berdasarkan pengamatan di lapangan, diketahui tidak jarang komite sekolah hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab hanya pada hal-hal tertentu saja misal, realisasi dana DAK Non Fisik, setelah itu tidak ada lagi wujud keterlibatannya, terjadinya konflik antara pengurus komite sekolah dengan pihak sekolah, vakumnya komite sekolah dan berbagai alasan lainnya. Kesimpulan dan saran yang diperoleh adalah: a. Upaya untuk melaksanakan manajemen Madrasah Aliyah tersebut sebagai salah satu bentuk kinerja di lingkungan sekolah tidaklah menjadi tanggung jawab sekolah itu saja, tetapi ia dapat melaksanakan bersama-sama dengan masyarakat, yang tergabung dalam komite sekolah, b. Bantuan yang bersifat konkrit dan komite sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Aliyah akan muncul manakala mampu melaksanakan pemberdayaan komite sekolah, untuk mewujudkan tujuan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon, Aceh Tengah provinsi Nangroe Aceh Darussalam c. Maka yang diharapkan, pihak terkait terutama Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten/Kota Takengon Aceh Tengah memprioritaskan program-program pelatihan terutama dalam kaitan dengan pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang tugas, peran, dan tanggung jawab komite sekolah guna pencapaian tujuan peningkatan kinerja komite sekolah.

Hasil penelitian ini dalam perspektif teori sesuai dengan pendapat Hasbullah (2016: 92 – 95) bahwa peran sebagai mediator adalah pihak netral yang membantu pemerintah dan masyarakat di satuan pendidikan dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Adapun indikator kinerja dari peran komite sekolah sebagai penghubung atau mediator adalah melakukan kerja sama dengan masyarakat, menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Demikian halnya pendapat Nasution (2016: 34) bahwa salah satu peran komite sekolah adalah mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerantaaan pendidikan;

Pelaksanaan peran komite sekolah sebagai mediator dalam implementasi prinsip MBS di TK perjuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat 1 menjelaskan bahwa Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas,

Marjuki (2015:56) menjelaskan bahwa bahan Bacaan konsep manajemen berbasis sekolah ada 6 yaitu keterbukaan atau transparansi manajemen dalam konteks MBS dilakukan secara terbuka atau transparan, sehingga seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan dapat mengetahui mekanisme pengelolaan sumber daya sekolah. Selanjutnya sekolah dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan lebih besar dari para pemangku kepentingan tersebut.

D. KESIMPULAN

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam implementasi prinsip manajemen berbasis sekolah di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih diantaranya adalah memberikan pertimbangan berbagai program sekolah dengan tetap melaksanakan prinsip prinsip MBS seperti kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Bentuk pertimbangan itu seperti membarikan masukan dalam perspektif anggaran, sarpras, pengelolaan pembelajaran, kemitraan dengan instansi dan orang tua peserta didik. Selain itu pertimbangan dari aspek kebijakan kebijakan sekolah yang bersifat umum dan melibatkan partisipasi masyarakat luas.

Peran komite sekolah sebagai pendukung dalam implementasi prinsip manajemen berbasis sekolah di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih adalah dengan memberikan dukungan materi maupun pemikiran agar sekolah tetap bisa melaksanakan MBS dengan semua prinsip-prinsipnya seperti kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Bentuk dukungan materi bisa berupa penggalangan dana dari masyarakat, sedangkan dukungan dalam bentuk tenaga diwujudkan dalam kerja bakti bersama, dan dukungan dalam bentuk pemikiran program program sekolah yang partisipatif.

Peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam implementasi prinsip manajemen berbasis sekolah di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih dilakukan dalam bentuk pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam laporan akhir tahun. Pengawasan dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan MBS dengan menerapkan semua

prinsip-prinsipnya diantaranya kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Pengawasan juga dilakukan dalam bentuk kunjungan ke sekolah untuk memastikan jalannya proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak usia dini.

Peran komite sekolah sebagai mediator dalam implementasi prinsip manajemen berbasis sekolah di Taman Kanak-kanak Perjuangan Desa Kluwih dilakukan dengan menjadi jembatan penghubung antara sekolah dengan masyarakat dan instansi lain. Peran sebagai mediator ini dalam rangka membantu sekolah melaksanakan pelaksanaan MBS dengan semua prinsipnya diantaranya kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Peran sebagai mediator ini dilaksanakan dengan merangkul semua komponen maupun stakeholder untuk bersama sama berpartisipasi di TK Perjuangan dalam bentuk ide, gagasan dan pemikiran secara finansial anggaran dana gotongroyong.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mursidi. 2013. *Pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Islam Al Zahra 29 Semarang*. Tesis.
- Dada Suryana Dan Nelti Riska (2019):37-38, *Managemen Pendidikan Usia Dini*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia
- Effendy Irawan dkk (2021). *Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan studi pada SMP Negeri 1 Surakarta*
- Fasli, Jalal dan Supriadi, Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jakarta: Depdiknas. Bappenas. Adicipta Karya Nusa
- Gunawan (2012). *Pelaksanaan Tugas Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.
- Kompri. 2014. *Manajemen Sekolah Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta.
- Kurni, D. K., & Susanto, R. (2018). Pengaruh Keterampilan Manajemen Kelas Terhadap Kualitas Proses Pembelajaran Di Sekolah Dasar Pada Kelas Tinggi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(1), 39–45.
- Lukman Manu dan Jusuf Blegur 2017: *Managemen Berbasis Sekolah*. Jakarta Rineka Cipta.
- Mulyasa. 2012, *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung : Remaja Rosdakarya

- Mursidi Ali.2012. *Pengelolaan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang*.Semarang : Jurnal Manajemen Pendidikan IKIP PGRI Semarang. 2 (1).19-31
- Nasution, Irwan. 2016. *Manajemen Pemberdayaan Komite Sekolah*. Jakarta: Tim GP Press.
- Nurkholis.2017. *Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model dan Aplikasi*.Jakarta: Grasindo.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Pemerintah dan Kebudayaan RI No. 75 Tahun 2016, *tentang Komite Sekolah*.
- Rut Sulastri (2019). *Pengelolaan Taman Kanak-Kanak Berbasis Sekolah*.Jakarta Rineka Cipta.
- Rahayu, R., & Susanto, R. (2018). *Pengaruh kepemimpinan guru dan keterampilan manajemen kelas Terhadap Perilaku Belajar Siswa Kelas IV*. 4(2), 220–229.
- Suparlan, 2013 *Managemen Berbasis Sekolah*.Cetakan kedua. Jakarta. Rineka Cipta.
- Rosyada, Dede, Prof, MA. 2017. Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2013. *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*. Jakarta: Fasilitator.
- Sekolah, D. I., & Kejuruan, M. (2018). Impelementasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Sekolah Menengah Kejuruan Hartoni,. *Jurnal Kependidikan Islam VIII, 1*(1).
- Sulaiman Bakri, Cut Zahri Harun, S. I. (2017). Manajemen Hubungan Sekolah Dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Smp Negeri 13 Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Pendidikan : Program Pascasarjana Unsyiah, 5*(1), 48–54.
- Sutarto Darmansyah, dan Warsono (2014) *Managemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia
- Suparlan, (2013) *Managemen Berbasis Sekolah dari Teori sampai dengan Praktek*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia
- Susi Herlinda. (2017) *Peran Komite Sekolah Terhadap Kinerja guru di TK Aisyiyah II Kota Pekanbaru*.Tesis.
- Susanto, R. (2018). Transformasi Nilai-Nilai Budaya Sikap Kerja 5s Dalam Penciptaan Suasana Akademik Perguruan Tinggi Yang Bermutu. *Pendidikan, 75–87*.
- Sugiyono, 2014.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, Imam. Pengembangan Pendidikan, Startegi, inovatif dan Kreatif dalam Mengelola Pendidikan secara komprehensip, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2014, h. 78.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat 1.